

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Instruksi ini mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga, serta membangun ketahanan keluarga melalui program-program yang langsung menyangar masyarakat. Dengan implementasi instruksi ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat dapat meningkat secara keseluruhan. Kampung Keluarga Berkualitas merupakan pendekatan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan secara terintegrasi untuk memperkuat dan memberdayakan keluarga (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3, 2022).

Dalam pelaksanaan Kebijakan BKKBN dibidang pengendalian kualitas penduduk serta KB, ketahanan dan kesejahteraan menuangkannya dalam bentuk kegiatan berupa Kampung KB. Sejarah terbentuknya Kampung KB berawal dari diterbitkannya surat dari kepala BKKBN dengan nomor 1258/AK.001/61/2015 tanggal 22 Oktober 2015 menandai dimulainya pembentukan Kampung KB. Pada 14 Januari 2016, Presiden Joko Widodo secara resmi Kampung KB dideklarasikan. Gagasan Kampung KB merupakan bentuk minimal untuk melaksanakan program KB yang komprehensif dan sistematis dan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan. Kampung KB merupakan gambaran bagaimana seharusnya sikap warga ketika program KB diberlakukan. Inisiatif diputuskan, dibuat untuk, dan didukung oleh publik yang lebih luas. Tujuan utama saat ini adalah pengembangan masyarakat. Komunitas bertanggung jawab atas segala hal lainnya, pemerintah hanya bertindak mendorong dan memberikan bantuan (Angisna, 2018).

Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program banggaencana dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis (Widya Saputra *et al.*, 2019). Namun Tahun 2020 slogan Kampung Keluarga Berencana Mengalami perubahan. Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas adalah program yang bukan hanya kegiatan berencana saja tapi lintas sektoral. Lintas sektoral itu semakin banyak sumber daya yang ikut berperan (Nanggungan *et al.*, 2023).

Pendirian Kampung KB dipilih berada di daerah pinggiran dengan angka kelahiran tinggi dan ekonomi lemah, sehingga lonjakan pertumbuhan penduduk semakin meningkat, dapat dipadamkan untuk mengurangi beban pembangunan. Motivasi pemerintah membuat program Kampung KB tentunya ada beberapa alasan mengapa hal ini di buat, antara lain untuk meningkatkan kebahagiaan pribadi daerah setempat pada level kota atau sederajat dengan program daerah terkait dan pembenahan, sepenuhnya bertujuan untuk menumbuhkan keluarga berkualitas dan memotivasi serta merevitalisasikan inisiatif Keluarga Berkualitas (KB) untuk mencapai tujuan segmen penghargaan. Program Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan ketahanan, kualitas, dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Subjek sasaran dari pelaksanaan operasional program ini adalah keluarga, yang mencakup keluarga dengan anggota yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan lansia. (Maleke *et al.*, 2022).

Hasil dari program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang Desa ada 4 indikator yaitu status IDM, jumlah keluarga miskin, angka stunting dan Ibangga. Kampung KB Desa Nongkodono dan kampung KB Desa Karanglo Kidul. Pada tahun 2022, Desa Nongkodono telah mencapai status desa mandiri menurut Indeks Desa Membangun (IDM). IKS Desa Nongkodono meliputi

kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman normal. IKE Desa Nongkodono yaitu keragaman produksi, perdagangan adanya pasar desa, akses kredit ada bank, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah normal, sedangkan mayoritas IKE di Desa Nongkodono di sektor pertanian. IKL Desa Nongkodono kualitas lingkungan potensi dan tanggap bencana normal. Upaya Pemerintah Desa Nongkodono dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi desa saat ini. Dengan memastikan masyarakat benar-benar menyadari situasi di desa, informasi pemerintahan desa lebih mudah terserap serta diakses dan diterima oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat dapat menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan warga masyarakat

Sedangkan Desa Karanglo Kidul tahun 2022, memiliki Status Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai desa maju. IKS Desa Karanglo Kidul meliputi kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman normal. IKE Desa Karanglo Kidul yaitu keragaman produksi, perdagangan tidak ada pasar desa, akses kredit tidak ada, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah sedangkan mayoritas IKE di Desa Karanglo Kidul di sektor pertanian. IKL Desa Karanglo Kidul kualitas lingkungan potensi dan tanggap bencana normal. Upaya Desa Karanglo Kidul dalam IDM adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap informasi desa, serta memastikan bahwa masyarakat menerima informasi tersebut dengan baik. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih di kalangan masyarakat terkait dengan informasi yang ada di Desa.

Kriteria keluarga miskin di Desa Nongkodono dapat dikenali melalui pola kehidupan yang cenderung mandiri, di mana setiap keluarga miskin menjalani kehidupan tanpa kehadiran anggota keluarga lain dalam satu rumah, miskin sakit dan tidak bekerja. Fakta ini dari kenyataan bahwa setiap kepala keluarga (KK) hanya memiliki satu orang anggota keluarga. Keadaan ini mencerminkan pola kehidupan keluarga miskin di Desa Nongkodono, yang dapat diukur dari aspek kebersamaan yang minim dalam satu rumah tangga.

Dengan demikian, kondisi ini untuk menilai tingkat kemiskinan masyarakat di Desa Nongkodono. Pada tahun 2022, Desa Nongkodono mencatat adanya 20 keluarga miskin. Upaya Desa Nongkodono dalam menurunkan angka kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan dengan mengintegrasikan dalam program peningkatan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dan di dukung beberapa kegiatan di antaranya lewat program UPPKA dalam pembuatan keripik dan kue kering Hal ini untuk memandirikan masyarakat desa dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Sedangkan Desa Karanglo Kidul memiliki kriteria keluarga miskin yang hidup sendiri, sakit-sakitan, dan kondisi fisik rumah yang masih tanah belum keramik. Kadaan ini mencerminkan pola kehidupan keluarga miskin di Desa Karanglo Kidul, yang dapat diukur dari aspek kebersamaan yang minim dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, kondisi ini untuk menilai tingkat kemiskinan masyarakat di Desa Karanglo Kidul. Desa Karanglo Kidul tahun 2022 ada 186 keluarga miskin. Upaya Desa Karanglo Kidul untuk mengurangi angka kemiskinan ke dalam peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dilakukan melalui program UPPKA seperti pembuatan tas anyaman dan pembuatan keripik. Dengan demikian untuk memandirikan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Desa Karanglo Kidul.

Angka stunting di Desa Nongkodono pada tahun 2022 ada 9. Dalam upaya stunting, peran bidan desa aktif dengan memberikan pelayanan kesehatan anak-anak stunting dan pemantauan pertumbuhan anak, memberikan penyuluhan gizi dan pola makanan yang seimbang. Desa Nongkodono lebih unggul dalam program BKB dan keaktifan masyarakat yang mengikuti BKB di dalam posyandu di Desa Nongkodono, dan mengerti tambahan gizi khusus untuk anak-anak yang mengalami stunting. Upaya Desa Nongkodono untuk menurunkan angka stunting melalui kegiatan di Kampung KB, terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan menyelenggarakan DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), penyuluhan dengan pengawalan tim kader KB, mulai dari pengawalan calon

pengantin, waktu hamil, sampai sudah anak sudah lahir tetap ada pemantauan dari tim kader KB. Desa juga memberikan tambahan makanan sehat dan bergizi untuk ibu hamil dan anak yang stunting. Upaya ini merupakan tanggung jawab pemerintah desa dalam menyediakan edukasi, pengawalan, dan aspek gizi, untuk penurunan stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Nongkodono.

Sedangkan Desa Karanglo Kidul tahun 2022 angka stunting ada 50. Sebenarnya aktif dalam posyandu, program BKB sudah di berika, sosialisasi penyuluhan tentang stunting sudah akan tetapi kesadarannya kurang sehingga menyebabkan angka stunting tinggi. Peran aktif bidan desa dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting, pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang seimbang, dengan melakukan pemantauan pertumbuhan anak stunting. Upaya pencegahan stunting di Desa Karanglo Kidul dilakukan melalui DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), pendampingan, pengawalan, dan dukungan nutrisi bagi ibu hamil serta balita. Pendampingan mencakup sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk optimalisasi penurunan angka stunting. Desa juga memberikan makanan tambahan sehat dan bergizi khususnya untuk ibu hamil dan anak stunting. Pemerintah desa berperan pengawalan, memberikan edukasi dan memberikan tambahan gizi masyarakat untuk mengurangi angka stunting.

Desa Nongkodono iBangganya senilai 75% dengan ukuran dari ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Dalam aspek ketentraman Desa Nongkodono berhasil memberikan kartu jaminan sehat kepada penduduknya. Upaya ini memastikan setiap warga dapat mengakses layanan kesehatan di poskendes (pos kesehatan desa) Nongkodono secara gratis bagi yang memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial). Ketidakmaksimalan iBangga di Desa Nongkodono di karenakan adanya konflik keluarga seperti tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, pergi dari rumah atau minggat, dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan Desa Nongkodono tidak mencapai angka yang maksimal dalam indikator iBangga. Aspek kedua kemandirian, masyarakat Desa Nongkodono memiliki sumber

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok perbulan. Dengan adanya *Inpomase* (Internet Ponorogo Masuk RT) rata-rata masyarakat di Desa Nongkodono bisa mengakses informasi di media online sehingga bisa mengakses platform jual beli bisa menambah penghasilan sehingga menyebabkan kemandirian. Aspek ketiga kebahagiaan Di Desa Nongkodono pemerintah desa mengadakan rekreasi bersama melalui kelompok yasinan, anggota PKK Desa, arisan RT, karang taruna, posyandu dan gapoktan untuk meningkatkan kebahagiaan. Masyarakat di Desa Nongkodono diagendakan dan dijadwalkan kegiatan sosial atau gotong royong di lingkungan RT yang mempererat solidaritas antar warga.

Sedangkan Desa Karanglo Kidul iBangganya senilai 70% dengan ukuran dari ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Dalam aspek ketentraman Desa Karanglo Kidul kartu jaminan Kesehatan belum merata. Upaya lain memastikan setiap warga bisa mengakses layanan kesehatan di poskendes (pos kesehatan desa) Karanglo Kidul secara gratis bila yang mempunyai kartu BPJS. Ketidakmaksimalan iBangga di Desa Karanglo Kidul dikarenakan adanya konflik keluarga seperti tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, pergi dari rumah atau minggat, dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan Desa Karanglo Kidul tidak mencapai angka yang maksimal dalam indikator iBangga. Aspek kedua kemandirian, masyarakat Desa Karanglo Kidul memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok perbulan. Dengan adanya *Inpomase* (Internet Ponorogo Masuk RT) rata-rata masyarakat di Desa Karanglo Kidul bisa mengakses informasi di media online sehingga bisa mengakses jual beli online bisa menambah penghasilan sehingga menyebabkan kemandirian. Aspek ketiga kebahagiaan Di Desa Karanglo Kidul pemerintah desa mengadakan rekreasi bersama melalui kelompok yasinan, anggota PKK Desa, arisan RT, karang taruna, posyandu dan gapoktan untuk meningkatkan kebahagiaan. Masyarakat di Desa Karanglo Kidul diagendakan dan dijadwalkan kegiatan sosial atau gotong royong di lingkungan RT yang mempererat solidaritas antar warga.

Referensi sebagai acuan merupakan langkah awal yang krusial. Setelah melakukan tinjauan terhadap literatur yang tersedia, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu yang pertama, menurut Tiara Angisna (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kampung KB di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur” membahas mengenai akibat dari kurangnya kesadaran awal beberapa peserta tentang Desa KB, terjadi peningkatan yang tidak proporsional dalam pengetahuan mereka tentang materi pelatihan, yang menyebabkan kinerja prates peserta di bawah standar. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi pelatihan yang ditawarkan di Kampung KB adalah tujuan yang diberikan. Secara keseluruhan, hasil belajar peserta pelatihan meningkat.

Penelitian terdahulu yang kedua, menurut Hani Putri Azhari (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Komunikasi BKKBN Provinsi Sumatera Utara dalam mensosialkan program pembentukan kampung KB” membahas mengenai Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menggunakan strategi komunikasi dalam sosialisasi program KB, yang melibatkan langkah-langkah seperti menetapkan tujuan, mengidentifikasi pesan, memfokuskan komunikasi, dan mengukur dampaknya. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala. Dari segi internal, terlihat keterbatasan PAD, jumlah SDM yang terbatas, kurangnya kerjasama lintas sektor, serta kurangnya pembangunan sarana dan prasarana yang optimal karena absennya bantuan anggaran. Dengan pemahaman atas tantangan ini, diharapkan solusi yang lebih efektif dapat ditemukan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi program kampung KB di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian terdahulu yang ketiga, menurut Rohayati *et al.*, (2021) Dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang,” dijelaskan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Nyapah belum mencapai tingkat optimal akibat berbagai hambatan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya finansial, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam

pembinaan ketahanan keluarga, serta kurangnya minat, terutama dari Pasangan Usia Subur (PUS), untuk bergabung sebagai peserta KB. Upaya perbaikan dilakukan melalui evaluasi program, peninjauan ulang terhadap ketersediaan sumber daya, dan koordinasi yang baik secara vertikal maupun horizontal. Diharapkan langkah-langkah ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Kampung KB di Kelurahan Nyapah, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

Penelitian terdahulu yang keempat, menurut Muhammad Deni Topan Febrian (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Program Kampung KB Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur," pelaksanaan Program Kampung KB di Kecamatan Rejotangan dapat dikatakan berhasil dalam memperlambat laju pertumbuhan penduduk, terlihat dari dimensi komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, ada beberapa dimensi yang belum sepenuhnya tercapai, seperti subdimensi staf dan fasilitas dalam dimensi sumber daya. Penelitian ini menghadapi kendala seperti penyesuaian pelaksanaan program yang terbatas selama pandemi, kurangnya legalitas komunitas Kampung KB di Kabupaten Tulungagung, pengawasan yang kurang memadai, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Penelitian dahulu digunakan sebagai upaya para peneliti dalam mencari perbandingan dan sebagai sumber inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Kebaruan penelitian ini dengan penelitian dahulu ialah mengenai penelitian yang melibatkan dua kampung KB berkelanjutan Desa Nongkodono dan Kampung KB berkembang Desa Karanglo Kidul. Selain dua kampung KB tersebut, pada penelitian ini tentang implementasi kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang Desa Karanglo Kidul.

Hasil dari program kampung keluarga berkualitas (KB) ada 4 indikator berkelanjutan Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB)

berkembang Desa Karanglo Kidul alasan inilah yang kemudian membuat saya tertarik untuk melihat sejauh mana implementasi program kampung KB.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut yaitu, bagaimana implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu, Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadikan sarana dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan peneliti tentang implementasi program

kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo

b. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo kedepannya terkait implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo.

D. Penegasan Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini akan dijelaskan pada paragraf-paragraf berikut untuk menghindari kesalahpahaman. Selain ungkapan-ungkapan ini akan menguraikan tujuan dan standar penelitian sehingga pembaca akan mengetahui apa yang telah dicapai.

1. Implementasi

Implementasi adalah proses menerapkan atau melaksanakan suatu rencana, ide, atau kebijakan ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan serangkaian langkah konkret yang perlu diambil, termasuk pengorganisasian sumber daya, pengaturan jadwal, penugasan tugas, dan pemantauan kinerja untuk memastikan bahwa semua aspek rencana berjalan sesuai harapan. Dalam konteks bisnis, implementasi dapat merujuk pada pengenalan produk baru, perubahan prosedur operasional, atau adopsi teknologi baru. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif antar tim, serta penanganan hambatan dan tantangan yang muncul selama proses. Misalnya, implementasi sebuah sistem teknologi informasi baru di sebuah perusahaan membutuhkan pelatihan karyawan, pengujian sistem, dan penyesuaian berkelanjutan untuk mengoptimalkan fungsionalitas dan memastikan

kelancaran operasional tanpa gangguan signifikan. Dengan demikian, implementasi bukan hanya soal mengubah rencana menjadi kenyataan, tetapi juga memastikan bahwa perubahan tersebut memberikan manfaat maksimal dan sesuai dengan tujuan strategis organisasi (Akib, 2008).

2. Kampung Keluarga Berkualitas (KB)

Kampung Keluarga Berkualitas adalah program yang bukan hanya kegiatan berencana saja tapi lintas sektoral. Lintas sektoral itu semakin banyak sumber daya yang ikut berperan. Program ini berfokus pada berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, dengan tujuan menciptakan keluarga yang sejahtera dan mandiri. Melalui Kampung KB, masyarakat diberdayakan untuk lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti penyuluhan kesehatan, program keluarga berencana, peningkatan keterampilan, dan kegiatan sosial lainnya. Kampung KB juga berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam upaya pembangunan keluarga yang berkelanjutan (Nanggung *et al.*, 2023).

E. Landasan Teori

a. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu sistem tatanan yang mengatur kehidupan bersama di dalam dan antar negara untuk memastikan bahwa kehidupan melayani kebaikan bersama (Nugroho, 2018). Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dengan sengaja oleh seorang atau sekelompok aktor yang bertujuan untuk mengatasi suatu permasalahan. (Anderson, 1979). Kebijakan publik adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. (Stewart, 1990). Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah, terdapat penekanan pada peran

penting sejumlah aktor, bukan hanya aktor tunggal, dalam proses pengambilan keputusan. (Peterson & Somit, 2003).

Pembuatan kebijakan publik tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Kebijakan publik muncul karena adanya tuntutan-tuntutan yang berasal dari berbagai pengaruh lingkungan, yang kemudian diubah ke dalam sistem politik. Proses transformasi ini dilakukan oleh berbagai aktor negara, dengan negara sebagai aktor utama. Namun, dalam lingkungan negara yang demokratis, peran ini tidak selalu didominasi oleh pemerintah. Seluruh aktor kebijakan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dapat berkontribusi secara kolektif (LAN, 2012).

Proses kebijakan publik menurut Dunn (2004) terbagi dalam lima tahap, yaitu :

1. Penetapan agenda kebijakan (agenda setting), yang melibatkan penentuan masalah publik yang akan diselesaikan.
2. Formulasi kebijakan, di mana kemungkinan kebijakan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah ditentukan melalui proses peramalan (forecasting) yang mempertimbangkan konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan.
3. Adopsi kebijakan, yang melibatkan pemilihan kebijakan dengan dukungan dari eksekutif dan legislatif, setelah melalui proses usulan atau rekomendasi kebijakan.
4. Implementasi kebijakan, tahap di mana kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh organisasi atau unit administratif tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya untuk mendukung kelancaran implementasi, serta dilakukannya pemantauan (monitoring) kebijakan.
5. Evaluasi kebijakan, yang merupakan tahap penilaian terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang dimulai setelah sebuah kebijakan politik yang sah diterbitkan, melibatkan pengelolaan proses implementasi untuk menghasilkan luaran atau hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Agustino (2008). Dalam proses ini, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat bergantung pada pelaksanaannya. Jika kebijakan tidak diimplementasikan dengan baik dan tepat, kebijakan tersebut akan kehilangan maknanya dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Sebaliknya, kebijakan yang diimplementasikan secara optimal akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut George C. Edward III (1980) dalam Agustino (2008), terdapat empat faktor penting yang menjadi sumber masalah sekaligus syarat keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini menjadi kriteria penting dalam menilai implementasi kebijakan.

a. Komunikasi

Keberhasilan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi. Untuk memastikan keberhasilan tersebut, pelaksana kebijakan perlu memahami dengan jelas langkah-langkah yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan harus mendapatkan informasi yang memadai mengenai tujuan dan sasaran kebijakan. Komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan komunikasi yang baik, pelaksana kebijakan dapat menyampaikan pesan dan informasi yang relevan secara jelas, menjelaskan tujuan kebijakan, memahami kebutuhan serta harapan kelompok sasaran, serta mengatasi potensi hambatan atau masalah yang mungkin timbul.

b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan informasi, tetapi juga pada ketersediaan dan kecukupan sumber daya pelaksana. Sumber daya yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Jika sumber daya yang tersedia tidak mencukupi, maka implementasi kebijakan tidak akan optimal dan berpotensi mengalami berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan meliputi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, keterampilan pelaksana yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, serta sumber daya keuangan yang cukup untuk mendanai berbagai kegiatan dan operasional yang diperlukan. Tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirancang dengan baik sekalipun tidak akan mampu mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, perencanaan dan pengalokasian sumber daya yang tepat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijakan merupakan faktor penting ketiga dalam melaksanakan kebijakan. Sikap dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Ketika pelaksana kebijakan memiliki sikap yang positif dan antusias, mereka cenderung melaksanakan tugas dengan lebih baik, berinovasi dalam menghadapi tantangan, dan mencari solusi untuk berbagai hambatan yang muncul. Sebaliknya, sikap yang negatif atau apatis dapat menghambat proses implementasi, menyebabkan penurunan kualitas kerja, dan bahkan dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang ada. Walaupun sumber daya yang memadai tersedia dan pelaksana kebijakan memiliki pemahaman serta kemauan untuk melaksanakan kebijakan, kelemahan dalam struktur birokrasi dapat menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, namun jika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan tersebut, penggunaan sumber daya yang ada akan menjadi tidak efisien, sehingga kemajuan dalam implementasi kebijakan dapat terhambat. Oleh karena itu, penting bagi birokrasi atau organisasi yang melaksanakan kebijakan untuk memiliki kapasitas yang memadai dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik melalui koordinasi yang efektif dan lancar.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional berfungsi untuk menjelaskan variabel secara spesifik berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan observasi atau pengukuran terhadap objek atau fenomena dengan cermat. Definisi operasional bertujuan untuk mengoperasionalkan penelitian sesuai dengan kondisi di lapangan, guna memperoleh hasil atau output yang diharapkan. Definisi operasional dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo mencakup komunikasi antara Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo, PLKB Kecamatan Kauman, PLKB Kecamatan Jambon, Pokja Kampung KB Desa Nongkodono, dan Pokja Kampung KB Desa Karanglo Kidul dalam pelaksanaan kebijakan program kampung KB

b. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo mencakup sumber daya manusia atau staf melibatkan peran Dinas PPKB Kabupaten Ponorogo, PLKB Kecamatan Kauman, PLKB Kecamatan Jambon Pokja Kampung KB Desa Nongkodono dan Pokja Kampung KB Desa Karanglo Kidul dalam pelaksanaan program kampung KB. Keterampilan pelaksana Kampung KB Desa Nongkodono dan Kampung KB Desa Karanglo Kidul dalam pelaksanaan kebijakan program BKL dan BKB dengan baik.

c. Disposisi

Disposisi dalam implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo mencakup dengan kewenangan mulai dari Instruksi Presiden, BKKBN, DPPKB Kabupaten Ponorogo, PLKB Kecamatan Kauman, PLKB Kecamatan Jambon, Pokja Kampung KB Desa Nongkodono dan Pokja Kampung KB Desa Karanglo Kidul para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan Program Kampung KB.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo mencakup struktur Pokja Kampung KB Desa Nongkodono dan Pokja Kampung KB Desa Karanglo Kidul dan aktor yang terlibat dalam program kampung KB Desa Nongkodono dan Kampung KB Desa Karanglo Kidul kesesuaian instansi terkait yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan apakah mampu mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan melalui koordinasi yang sistematis dan lancar.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk memastikan bahwa fokus kajian sejalan dengan kenyataan di lapangan, penelitian semacam ini ditonjolkan dengan landasan teori yang digunakan sebagai bukti. Peneliti dengan menggunakan metode kualitatif berpartisipasi dalam situasi atau peristiwa yang sedang diteliti. Oleh karena itu, hasil dari pendekatan kualitatif harus dianalisis secara menyeluruh oleh para peneliti. Pada umumnya penelitian kualitatif menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara untuk mengumpulkan sebagian besar datanya (Muhammad, 2021).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kampung KB Desa Nongkodono Kecamatan Kauman dan kampung KB Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon, dipilih sebagai lokasi penelitian dengan berbagai pertimbangan.

3. Subjek/ Pemilihan Informan

Subjek dalam penelitian ini adalah DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Ponorogo. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah dilakukan dengan berdasarkan tujuan dari penelitian itu sendiri. *Purposive* itu sendiri adalah teknik pengambilan informan dengan sengaja yang dinilai mampu untuk menyampaikan informasi dan data yang *rill* data yang sebenar- benarnya. Dalam penelitian ini informan yang di pilih :

- 1) Kepala bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakkan : Dra. Budi Lestari Mukti M.M.

- 2) Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLBK) : Drs. Mulyoto dan Ir. Titik Budhiyarti.
- 3) Kepala Desa Nongkodono Kecamatan Kauman : Jemadi, S.Sos.
- 4) Kepala Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon : Islami, S.H.
- 5) Warga masyarakat Desa Nongkodono dan Desa Karanglo Kidul.

Alasan mengapa peneliti memilih informan di atas dikarenakan peneliti menganggap bahwa informan Budi Lestari Mukti M.M sebagai Kepala bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakkan Kabupaten Ponorogo, Drs. Mulyoto dan Ir. Titik Budhiyarti sebagai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLBK), Jemadi, S.Sos sebagai Kepala Desa Nongkodono Kecamatan Kauman dan Islami, S.H sebagai Kepala Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon dianggap memahami permasalahan tentang program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang akan diteliti oleh peneliti nantinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui terdapat beberapa metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan :

1) Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan dilakukan secara tatap muka, biasanya dilakukan antara pencari informasi dengan pemberi informasi. Metode untuk memperolehnya adalah melalui wawancara mendalam. Informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Melalui sesi tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka dengan informan atau subjek wawancara, dengan atau tanpa menggunakan panduan ini, dimana informan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dalam jangka waktu yang relatif lama (Soripada, 2021).

Dalam wawancara ini, metode pengumpulan data melibatkan proses tanya jawab langsung dengan informan yang bertujuan untuk

mendapatkan informasi yang mendukung penelitian yang dilakukan di Desa Nongkodono Kecamatan Kauman dan Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dalam penelitian kualitatif yang berisi serangkaian pertanyaan pendahuluan, sehingga memungkinkan pewawancara untuk mengeksplorasi perkembangan baru dalam alasan wawancara. (Apriliani *et al.*, 2021)

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, dengan mencatat atau merekam data dari arsip atau informasi yang berkaitan dengan data penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Fungsi data yang diperoleh dari dokumentasi biasanya digunakan sebagai bahan untuk pembantu melengkapi informasi dasar yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan lain-lain (Arischa, 2020).

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian perlu adanya analisis data dengan tujuan agar penelitian ini dapat terlaksana dengan efektif. Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data kali ini merupakan metode menurut Miles *et.al.*, (2014) dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Data Analysis* yang dalam buku ini meliputi metode tentang kondensasi data, penyajian data, dan juga penarikan dan verifikasi kesimpulan.

1) Kondensasi Data

Kondensasi data bisa dipahami sebagai proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan juga perubahan catatan di

lapangan, data dari transkrip wawancara, dokumentasi dan juga data empiris. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang dilakukan langsung terhadap kampung KB berkelanjutan Desa Nongkodono dan kampung KB berkembang Desa Karanglo Kidul, selain mengambil data dari pemerintahan, penelitian ini juga akan mencari data dari masyarakat yang tergabung dalam kampung KB. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kali ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo.

2) Penyajian Data

Penyajian data disajikan agar bisa membantu atau memudahkan penulis sehingga bisa memahami permasalahan yang ada sehingga bisa melanjutkan ketahap selanjutnya. Data yang disajikan berupa deskripsi, bagan, grafik dan lainnya. Setelah mengumpulkan data tentang bagaimana implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo maka langkah selanjutnya adalah menyusun hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang kemudian dibahas secara rinci.

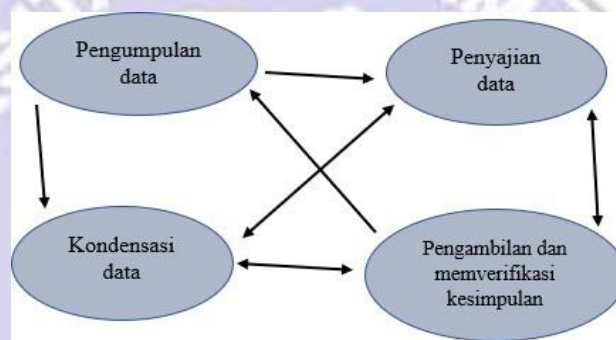
3) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah kondensasi data dan juga data-data disajikan dan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Di metode ini, peneliti menafsirkan hasil dari penelitiannya dan selanjutnya disajikan dengan bahasa yang lebih ringkas, padat dan mudah difahami. Setelah mencari data mengenai bagaimana implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas

(KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo maka kesimpulan dipaparkan mengenai tentang implementasi program kampung keluarga berkualitas (KB) berkelanjutan di Desa Nongkodono dan kampung keluarga berkualitas (KB) berkembang di Desa Karanglo Kidul Kabupaten Ponorogo (Miles *et,al.*, 2014).

Dengan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa analisis data terdiri dari beberapa tahapan yang dilaksanakan. Tahapan tersebut dilakukan dalam proses penelitian dengan tujuan tertentu. Proses atau tahapan analisis digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Metode Analisis Data



Sumber : (Miles *et al.*, 2014)

6. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data ialah upaya atau tindakan untuk memberikan kepercayaan terhadap data yang diperoleh, yang nantinya data tersebut dapat dipercaya atau tidak dipercaya dan juga dipertanggung jawabkan. Untuk memberikan validitas data yang optimal, maka perlunya dilakukan uji keabsahan pada data.

Pada penelitian ini keabsahan data akan diuji dengan teknik Triangulasi. Dalam pengujian kredibilitas triangulasi diartikan sebagai pengecekan data yang berasal dari beberapa sumber informasi/data. Triangulasi dilakukan agar validitas data lebih terpercaya karena dengan

pengujian data ini penelitian bisa lebih konkret dan terverifikasi. Pengujian data dengan teknik triangulasi dilakukan dengan pengujian data yang kemudian data tersebut dibandingkan atau dinilai dari hasil wawancara atau obyek tertentu yang bersangkutan. Tipe triangulasi dikemukakan oleh Denzim (1978) bahwa triangulasi memiliki empat hal, yaitu triangulasi antar penelitian, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data (Denzim, 1978).

Di dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik ini menggunakan triangulasi metode yang dimana informasi itu dibandingkan dengan cara-cara yang berbeda. Dengan teknik ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode-metode pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Metode ini digunakan sebagai bahan pengumpulan informasi yang valid

